

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West Publishing CO., United States of America.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.
- M.D.,Moh. Mahfud, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1989 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilihan umum*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

- Prihatmoko, Joko P., 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21 Press, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu: dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rauf, Maswadi, *et al.*, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sirajuddin, *et al.*, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soehino, 1993, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Strong, C.F., 1996, *Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study Of Their History And Existing Form*, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.
- Sumardjono, Maria S.W., 1995, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suny, Ismail, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Thaib, H. Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tricahyo, Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional*, Intrans, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuda, Hanta, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

### Jurnal

Aritonang, Dinoroy Marganda, “Penerapan Sistem Presidensiil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010.

Evangelista, Beverly, “Eksistensi Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945”, *Jurnal IUS*, Vol. 2, No.5, Agustus 2014.

Fiorina, Morris P. , “An Era of Divided Government” , *Political Science Quarterly*, Vol. 107, No. 3, Autumn 1992.

Firdinal, Ziffany, “Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Fitra, Ade Fadillah, “Analisis Yuridis Ketentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jom Fakultas Hukum*, Vol.4, No. 2, Oktober 2017.

Golder, Matt, “Presidential Coattails and Legislative Fragmentation”, *American Journal of Political Science*, Vol. 50, No. 1, January 2006.

Hendra T.P, Ahmad., “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, No.3, 2013.

Linz, Juan J., “The Perils of Presidentialism”, *Journal of Democracy*, Vol. 1, No. 1, Winter 1990.

Mukhtarrija, Muhammad, *et al.*, “Inefektifitas Pengaturan *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 4, Oktober 2017.

\_\_\_\_\_, “The Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a Simultaneous General Election in Indonesia”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.5, No.3, Juni 2018.

Nuryanti, Sri, “Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No.1, Juni 2015.

Pitoy, Hezky Fernando, “Mekanisme *Checks and Balances* antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *lex et Societatis*, Vol. 2, No. 5, Juni 2014.

- Shugart, Matthew Soberg, "The Electoral Cycle and Institutional Source of Divided Presidential Government", *The American Political Science Review*, Vol. 89, No. 2, Juny 1995.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2, April 2016.
- Thaib, Dahlan, "Penegakan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum Analisis dan Tinjauan dari Aspek Ketatanegaraan", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.6, 1996.
- Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

#### **Hasil Penelitian / Tugas Akhir**

- Abdurrohman, 2018, *Presidential threshold dalam Pemilu di Indonesia*, Perspektif Imam Al-Mawardi, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Ghoza F, Mohammad, 2014, *Presidential threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, *et.al*, 2015, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Hasil Penelitian, Electoral Research Institute Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

#### **Artikel dalam Antologi dengan Editor**

- Asshiddiqie, Jimly, "Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konsitusi Berbagai Negara", dalam Sirajuddin, *et al.*, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Indrayana, Denny, "Mendesain presidensial yang efektif, bukan 'presinden sial' atau 'presiden sialan' ", dalam Sirajuddin, *et al.*, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Kusnardi, *et al.*, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", dalam Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional*, Intrans, Malang.
- MD, Moh. Mahfud, "Pemilu dalam Optik Politik Hukum", dalam Janedjri M. Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, dalam Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.

Soedarsono, “Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Demokrasi”, dalam Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional*, Intrans, Malang.

Soemantri, Sri, “Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN”, dalam Sirajuddin, *et al.*, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

### Artikel Majalah atau Koran

Indrayana, Denny, “Mendesain Pilpres Antikorupsi”, *Kompas*, 29 Juni 2017.

Hanan, Djayadi, “Ambang Batas Presiden”, *Kompas*, 26 Juli 2017.

\_\_\_\_\_, “Efek Ekor Jas”, *Kompas*, 8 Februari 2018.

### Internet

Adhari, Agus, “Eksistensi Presidential threshold pada Pemilihan Umum Serentak 2019”, [https://www.researchgate.net/publication/299537176\\_Eksistensi\\_Presidential\\_Threshold\\_Pada\\_Pemilihan\\_Umum\\_Serentak\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/299537176_Eksistensi_Presidential_Threshold_Pada_Pemilihan_Umum_Serentak_2019), diakses 15 Agustus 2018.

Asril, Fitra, “Pemilu Serentak dan Presidential Threshold”, <https://nasional.sindonews.com/read/1256443/18/pemilu-serentak-dan-presidential-threshold-1510356238/>, diakses pada 16 Oktober 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambang%20batas>, diakses 03 Oktober 2018.

Bhakti, Ikrar Nusa, “Memilih Model Sistem Pemilu Serentak”, <http://news.metrotvnews.com/opini/VNnxRqOk-memilih-model-sistem-pemilu-serentak>, diakses pada 18 September 2018.

Eksha, Golda, “Penaikan Presidential Threshold Picu Oligarki Politik”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/89893-penaikan-presidential-threshold-picu-oligarki-politik>, diakses pada 27 September 2018.

Ghafur, Jamaludin, “Presidential Threshold”, <http://law.uui.ac.id/presidential-threshold/>, diakses 03 Oktober 2018

- Google, “Google Terjemahan”,  
<https://translate.google.co.id/?hl=id#en/id/presidential%20threshold>, diakses  
03 Oktober 2018.
- Hanan, Djayadi, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia:  
Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”,  
[www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/.../Makalah-Djayadi-Hanan.pdf](http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/.../Makalah-Djayadi-Hanan.pdf), diakses  
13 September 2018.
- Indrayana, Denny, “Syarat Capres, Piala Dunia, dan Rasionalitas”,  
<https://kumparan.com/denny-indrayana/syarat-capres-piala-dunia-dan-rasionalitas-27431110790536295>, diakses 10 September 2018.
- Isra, Saldi, “Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial” ,  
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/417-problematik-koalisi-dalam-sistem-presidensial.html>, diakses pada 24  
September 2018.
- JA, Denny, “Mengapa Ambang Batas Calon Presiden 2019 Bermasalah”,  
<https://news.detik.com/kolom/3574597/mengapa-ambang-batas-calon-presiden-2019-bermasalah>, diakses 09 Juli 2017.
- Lestari, Reni, “Presidential threshold untuk Kuatkan Sistem Presidensial,  
Perludem: Tak Masuk Akal!”,  
<https://news.okezone.com/read/2017/05/23/337/1697956/presidential-threshold-untuk-kuatkan-sistem-presidensial-perludem-tak-masuk-akal>,  
diakses 21 September 2018.
- Oxford University Press, “Oxford English Dictionary”,  
<http://www.oed.com/view/Entry/150745?redirectedFrom=presidential#eid>,  
diakses 03 Oktober 2018.
- Prabowo, Dani, “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, diakses pada 22 September 2018.
- Tim Okezone, “Pengamat: *Presidential Threshold* Hanya untuk Pertahankan  
Oligarki Parpol Besar”,  
<https://news.okezone.com/read/2017/05/24/337/1699186/pengamat-presidential-threshold-hanya-untuk-pertahankan-oligarki-parpol-besar>,  
diakses 27 September 2018.
- Retaduari, Elza Astari , “Modal Jokowi di Pilpres 2019: 52,21% Suara Parpol  
Pemilu 2014”, <https://news.detik.com/berita/3882437/modal-jokowi-di-pilpres-2019-5221-suara-parpol-pemilu-2014>, diakses pada 20 September  
2018.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2017.